



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU DALAM PEMILIHAN

BUPATI DI KABUPATEN KAMPAR

TAHUN 2017

SKRIPSI

OLEH

DICKY RINALDO

NIM : 11375105817



PROGRAM S.I
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGARI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
RIAU
2020

ic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DESA TANJUNG
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU DALAM PEMILIHAN
BUPATI DI KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2017**

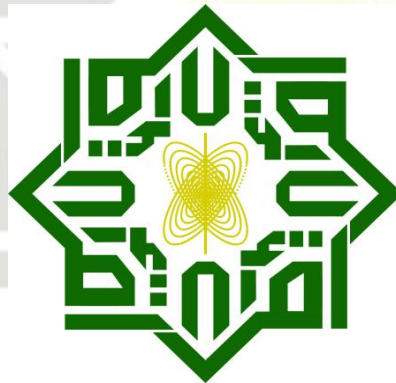
SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi
Negara (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH :

DICKY RINALDO

NIM : 11375105817



JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DICKY RINALDO
 NIM : 11375105817
 JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
 DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DI KABUPATEN
 KAMPAR TAHUN 2017

DISETUJUI

Pembimbing

Candra Jon Asmara, S.sos, M.Si
 NIP 130712074

MENGETAHUI

Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. H. Nuri Said, HM, M.Ag, MM
 NIP 19620512 198903 1 003

Ketua Jurusan
 Ilmu Administrasi Negara

Dr. Kamaruddin, S.sos, M.si
 NIP 1979101 2007 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DICKY RINALDO

NIM : 11375105817

FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL : ANALISIS PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR
HULU DALAM PEMILIHAN BUPATI DI
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017

HARI/ Tgl.UJIAN : Kamis 23 April 2020

PANITIA PENGUJI,
KETUA PENGUJI


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1003

PENGUJI I


Virna Museliza, SE, M.Si
NIP. 130 712 073

PENGUJI II


Muslim, S.Sos, M.Si
NIP. 19820205 201503 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang mana atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya yang penulis beri judul **“Analisis Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Kampar Tahun 2017”**.

Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan untuk Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Semoga shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada beliau dan para sahabat-sahabatnya dan semoga kita tergolong pada orang-orang ahli syurga. Aamiin ya Rabb..

Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memotivasi baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena dengan ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima kasih yang tak terhingga buat Kedua Orang Tua Tercinta
Ayahanda dan Ibunda, beserta keluarga besar terimakasih atas segala jasa dan tak pernah lelah mendidik penulis dan selalu mendukung penulis serta pengertian selama penulis mengikuti pendidikan perkuliahan dan penyelesaian karya ilmiah.
3. Bapak Prof. DR. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Drs. Muh Said HM, M.ag, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara.
6. Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos, M.KP, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara.
7. Bapak Candra Jon Asmara, S. Sos, M. Si, selaku pembimbing skripsi penulis yang telah banyak meluangkan waktu serta fikiran dalam membimbing penulis guna penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada penulis dan kepada seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
9. Bapak Tengku Said Hidayat, S.Stp, selaku Camat Koto Kampar Hulu serta para panitia pelaksana pilkada dan masyarakat yang telah ikut berpartisipasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian ini, yang mana telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan.

10. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Administrasi Negara angkatan 2013 terimakasih telah banyak memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, serta buat semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Akhirnya atas segala bantuan dari semua pihak, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 7 Maret 2020

Penulis

Dicky Rinaldo
11375105817

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU DALAM PEMILIHAN BUPATI DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017

Oleh :

Dicky Rinaldo

11375105817

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu. Adapun tujuan dari pengajuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Analisis Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Kampar Tahun 2017. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Kemudian metode analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan menyusun argumentasi dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, menginterpretasikan data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Dengan metode ini penulis memaparkan dan menguraikan kata-kata yang didapat, dimana selanjutnya penulis menganalisa dan menginterpretasikan data dan dihubungkan dengan teori kemudian mengambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini Pelaksanaan Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2017, secara indikator cukup terlaksana dengan baik karena berdasarkan interval yang telah ditetapkan bahwa Analisis Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2017 berada pada rentang interval 388-508 atau cukup baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------------|
| KATA PENGANTAR | iii |
| ABSTRAK | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 13 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 13 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 14 |
| 1.5. Sistematika Penulisan..... | 14 |
| BAB II. LANDASAN TEORI | 17 |
| 2.1. Konsep Administrasi..... | 17 |
| 2.2. Pengertian Pendidikan Politik..... | 18 |
| 2.3. Indikator Pendidikan Politik | 19 |
| 2.4. Pengertian Partisipasi Politik | 20 |
| 2.5. Bentuk Bentuk Partisipasi Politik | 28 |
| 2.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik | 30 |
| 2.7. Konsep Pemilihan Kepala Daerah | 31 |
| 2.8. Pandangan Islam terhadap Pemerintah | 32 |
| 2.9. Penelitian Terdahulu | 38 |
| 2.10. Kerangka Pemikiran..... | 39 |
| 2.11. Konsep Operasional | 40 |
| 2.12. Defenisi Konsep | 41 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | 43 |
| 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian | 43 |
| 3.2. Jenis dan Sumber Data | 45 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|--|---|-----------|
| 3.3. | Metode Pengumpulan Data..... | 44 |
| 3.4. | Populasi dan Sampel Penelitian | 45 |
| 3.5. | Teknik Analisis Data..... | 45 |
| BAB IV TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN..... | | 48 |
| 4.1. | Profil Kecamatan Koto Kampar | 48 |
| 4.2. | Kondisi Geografis Desa Tanjung | 49 |
| 4.3. | Kondisi Demografis Desa Tanjung..... | 51 |
| 4.4. | Sarana dan Prasarana Desa Tanjung | 54 |
| 4.5. | Pemerintahan Desa Tanjung | 57 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | 59 |
| 5.1. | Identitas Responden | 59 |
| 5.2. | Analisis Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Kampar Tahun 2017 | 61 |
| 5.3. | Rekapitulasi Tanggapan Responden Analisis Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2017 | 83 |
| 5.4. | Hambatan yang dialami pada Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2017..... | 84 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... | | 86 |
| 6.1. | Kesimpulan | 86 |
| 6.2. | Saran..... | 88 |

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Halaman

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Penduduk Desa Yang Mempunyai Hak Pilih Dan Yang Tidak Memilih Dari Desa Tanjung Tahun 2017 | 8 |
| Tabel 2.1 | Operasional Variabel Penelitian Tentang Analisis Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2017 | 43 |
| Tabel 3.1 | Populasi dan Sampel Penelitian | 47 |
| Tabel 4.1 | Jumlah Penduduk Desa Tanjung Menurut Jenis Kelamin | 53 |
| Tabel 4.2 | Jumlah Penduduk Desa Tanjung Menurut Suku | 54 |
| Tabel 4.3 | Penduduk Desa Tanjung Yang Menyalurkan Hak Pilih | 54 |
| Tabel 4.4 | Jumlah Penduduk Desa Tanjung Menurut Mata Pencaharian | 55 |
| Tabel 4.5 | Jumlah Penduduk Desa Tanjung Menurut Agama | 55 |
| Tabel 4.6 | Jumlah Penduduk Desa Tanjung Menurut Tingkat Pendidikan | 56 |
| Tabel 4.7 | Potensi Dan Luas Lahan Produksi Tanah Pertanian Desa Tanjung . | 57 |
| Tabel 4.8 | Jumlah Sarana Ibadah Desa Tanjung | 58 |
| Tabel 4.9 | Jumlah Sarana Objek Wisata Desa Tanjung | 58 |
| Tabel 4.10 | Jumlah Organisasi Keagamaan Desa Tanjung | 59 |
| Tabel 4.11 | Jumlah Sarana Pendidikan Desa Tanjung | 59 |
| Tabel 4.12 | Struktur Pemerintahan Desa Tanjung | 60 |
| Tabel 4.13 | Daftar Nama Kepala Dusun Desa Tanjung | 61 |
| Tabel 4.14 | Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung . | 61 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 5.1 | Jumlah Responden (Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu)..... | 62 |
| Tabel 5.2 | Responden Berdasarkan Umur..... | 63 |
| Tabel 5.3 | Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan. | 64 |
| Tabel 5.4 | Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Mendapat Penjelasan dalam Memilih Bupati Tahun 2017 | 67 |
| Tabel 5.5 | Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Mendapat Koordinasi dalam Pilkada Oleh Pengurus Pilkada Kepada Masyarakat | 70 |
| Tabel 5.6 | Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kurikulum Terpadu (<i>Integrated Curriculum</i>) Dalam Analisis Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2017..... | 72 |
| Tabel 5.7 | Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Ikut Berpartisipasi Dalam Memilih Bupati Kampar Tahun 2017 | 74 |
| Tabel 5.8 | Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Memiliki Pengetahuan Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2017..... | 77 |
| Tabel 5.9 | Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Hari Terpadu (<i>Integrated Day</i>) dalam Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2017..... | 79 |
| Tabel 5.10 | Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu memiliki pemahaman tentang hak dalam memilih Bupati Kampar tahun 2017 | 81 |
| Tabel 5.11 | Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Memiliki Kewajiban Bermasyarakat Dalam Memilih Bupati Kampar Tahun 2017..... | 84 |
| Tabel 5.12 | Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pembelajaran Terpadu (<i>Integrated Learning</i>) dalam Analisis Pendidikan Politik | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|----|
| Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2017..... | 86 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| Tabel 5.13 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Analisis Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2017 | 87 |
|---|----|



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Halaman

| | |
|---|----|
| Gambar 2.2. Kerangka Pikiran Analisis Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2017 | 42 |
|---|----|



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|---|---------|
| Lampiran 1. Daftar Angket Penelitian | 94 |
| Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Angket | 96 |
| Lampiran 3. Daftar Wawancara | 97 |
| Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian | 99 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berangkat dari perjalanan demokrasi Indonesia semakin berbenah dengan melakukan berbagai perombakan terhadap sistem pemilu termasuk lahirnya peraturan pemerintah (PP) No 06 tahun 2005 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah hasil amandemen UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan aplikasi dari kata demokratis hasil amandemen UUD 1945 yang tertuang dalam pasal 18 ayat (4) bahwa gubernur/ wakil gubernur, walikota dan wakil walikota serta bupati dan wakil bupati di tingkat provinsi, kab/kota dipilih secara demokratis.

Lahirnya PP No. 06/ 2005 ini membawa kita pada sebuah arena perpolitikan yang dinamis dan bermutu. Sebab dengan keterlibatan rakyat secara langsung dalam pengambilan kebijakan politik melalui pemungutan suara diharapkan pemimpin yang dilahirkan benar-benar bermutu dan mempunyai loyalitas, profesional memiliki kapabilitas untuk memajukan daerahnya. Rakyat sebagai *stakeholder* dalam pemilihan kepala daerah (Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung) diharapkan mampu menjalankan amanah dan mempunyai peran penting untuk lebih menciptakan pemimpin yang betul-betul mampu menjalankan roda pemerintahan untuk kemajuan suatu daerah.

Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaan pemilu ini tidak serta merta berarti proses demokrasi di Indonesia juga berhasil atau terkonsolidasi. Hal ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diungkapkan oleh Willam Lidle yang mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia belum terkonsolidasi dengan baik. Keharusan demokrasi ditambah Lidle adalah menjadi sistem yang normal dalam kanca perpolitikan Indonesia sekarang ini (dalam Proyono, dkk, 2007:43-44). Salah satu demokrasi menurut John Locke (1632-1704) adalah prinsip trias politica yang membagi tiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk mewujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain (Miriam Budiardjo, 2004: 151).

Harus disadari bahwa pemilihan kepala daerah langsung merupakan langkah maju dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, ia menjadi pilihan strategis setelah bentuk lain dari demokrasi itu sendiri sepanjang pemilu Indonesia. Di era modernisasi ini banyak persoalan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat baik secara individual maupun sosial yang menyangkut pola hidup dan tatanan kehidupan yang dijalaninya. Hal ini banyak berkaitan dengan adanya sistem yang berlalu baik dari norma adat, budaya, agama, maupun hukum.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan suatu sarana pelaksanaan azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai pasal 110 No 3 Undang-Undang Pemerintahan Daerah No.32 Tahun 2004 yang berbunyi "Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut dalam konteks eksplisit di muat dalam undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan di tambah petunjuk teknis melalui peraturan pemerintah No 6 tahun 2005 tentang cara pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam undang-undang tersebut sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya di sebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan atau kabupaten berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar (UUD) negara reepublik indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah (Muhadam Labolo, 2010:128-129).

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-undang No. Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Selanjutnya undang-undang ini juga diperjelas dengan adanya Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Tanggung jawab pelaksanaan pemilihan kepala daerah berada ditangan komisi pemilihan umum daerah (KPUD), yang didalam melaksanakan tugas pemilihan kepala daerah berpedoman kepada peraturan-peraturan yang telah diterbitkan oleh komisi pemilihan umum (KPU) pusat. Sehingga petunjuk teknis atau pelaksanaan KPUD dalam melaksanakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilihan kepala daerah berpedoman kepada peraturan yang disusun dan diterbitkan oleh KPU pusat.

Sebagai perwujudan bukti sebuah negara menerapkan sistem demokrasi ialah dengan menggelar perhelatan pemilihan umum. Sistem pemilihan umum merupakan salah satu sistem atau kelembagaan penting di dalam sistem demokrasi. Penerapan sistem pemilihan umum di Indonesia masih terbilang belum sepenuhnya mampu merepresentasikan kehendak masyarakat Indonesia baik di daerah perkotaan terlebih-lebih di daerah pedesaan atau dusun sekalipun. Masyarakat Indonesia pada umumnya telah mampu mengikuti proses pemilu dan menghormati hasil pemilu, namun pemilu di Indonesia masih banyak menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Pemilu menjadi indikator yang paling mudah dalam menentukan sebuah negara tersebut demokratis atau tidak, karena Pemilu memberikan sebuah momentum kepada masyarakat untuk menentukan arah perkembangan sebuah negara (Iqbal, 2013:1).

Begitu pula yang terjadi pada proses sistem demokrasi yang terjadi pada Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Kampar Tahun 2017 kemarin dimana jumlah partisipasi masyarakat mengalami penurunan angka pemilih dari tahun pemilihan kemarin, dimana ini diakibatkan kurangnya pemahaman serta pendidikan politik masyarakat dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Kampar, hingga pada tiga Dusun di Desa tersebut timbul adanya ketimpangan politik, bukan cuman itu kurangnya infrastruktur yang memadai sehingg asumsi politik masyarakat setempat dibidang pemilihan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan kurang, ditambah dengan kurangnya perhatian pemerintah daerah tersebut pada masa jabatan kemarin mengenai pembangunan infrastruktur sehingga menyebabkan kepercayaan suatu masyarakat terhadap calon Bupati di Kabupaten Kampar yang baru akan di pilih itu menurun.

Seterusnya melihat kondisi dan peran partisipasi masyarakat di desa Tanjung yang masih kurang efektif maka dari itu di pandang perlu Mewawancarai Masyarakat desa Tanjung, Bapak Sualaimana salah seorang Ketua KPPS TPS 1 dan masyarakat desa Tanjung, sebagai dasar awal penelitian bahwa faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi politik di desa Tanjung kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar beliau mengatakan “Dalam pemilihan kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Tahun 2013 masyarakat banyak mengeluhkan masalah ekonomi di mana ada sebagian masyarakat yang bekerja di luar desa dan akhirnya tidak bisa mengikuti pencoblosan karna mengingat biaya yang mereka butuhkan untuk pulang kampung itu, dan ada juga masyarakat yang memang benar benar malas datang ke TPS atau lebih mementingkan bersantai di rumah, serta masyarakat yang tidak patuh dengan hukum atau peraturan”.(Hasil Wawancara Selasa 24 Desember 2017).

Salah satu daerah kabupaten yang telah melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung adalah kabupaten Kampar yaitu tepatnya pada Rabu 15 Februari 2017.lalu. Pemilihan kepala daerah (pilkada) kali ini merupakan awal dari terciptanya demokratisasi dan budaya politik lokal dalam sistem perpolitikan tanah air di Kampar. Menurut pakar politik arbi sanit, ada tiga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

golongan kepentingan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yaitu (a) kepentingan elit politik nasional, (b) kepentingan elit politik lokal, dan (c) kepentingan rakyat kebanyakan. Beberapa daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara umum untuk jabatan Gubernur atau Bupati/Walikota menyisakan banyak catatan terhadap perkembangan dan keberlangsungan demokrasi. Satu di antara pilar yang disebutkan adalah kepentingan rakyat tenggelam oleh dominasi kepentingan para elit yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tersebut. Dari pantauan dan pengamatan di beberapa daerah pemilihan di Kabupaten Kampar terdapatnya berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) misalnya adanya isu Money politik, intimidasi terhadap warga eks-transmigrasi dan masih banyak laporan pelanggaran lainnya (panwas pemilihan kepala daerah (pilkada) Kampar, 2013). Jika diprediksi dari 330 daerah kab/kota yang sudah melaksanakan pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala daerah (pilkada) di kabupaten Kampar penulis meyakini tergolong sukses tanpa ada kerusuhan dan konflik yang berlarut-larut seperti daerah lainnya di Indonesia.

Peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) Kampar terdiri dari 5 pasangan calon, yaitu (1) Muhammad Amin berpasangan dengan Muhammad Saleh (2) Zulher berpasangan dengan Dasril Affandi (3) Aziz Zaenal berpasangan dengan Catur Sugeng Susanto (4) Jawahir berpasangan dengan Bardansyah Harahap, dan (5) Rahmat Jevary Juniardo berpasangan dengan Khairuddin Siregar. Keempat pasangan calon bupati dan wakil bupati di atas terdiri dari berbagai profesi, ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari birokrat, politisi dan pengusaha. Partisipasi politik di Tanjung dalam pemberian suara terhadap masing-masing calon bupati dan wakil bupati terdistribusi secara bervariasi.

Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kampar nomor urut 3, Aziz Zaenal-Catur Sugeng Susanto berhasil meraih suara terbanyak pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, dengan perolehan suara sebanyak 106.085 suara atau 32,42 %. Sedangkan pasangan nomor urut 5 Rahmat Jevary Juniardo-Khairuddin Siregar berada pada posisi kedua dengan perolehan suara sebanyak 99.084 suara atau terpaut 7.001 dari perolehan suara paslon Aziz-Catur atau selisih 2,14 %. Pada posisi ketiga diraih paslon nomor urut 2, Zulher - Dasril Affandi dengan perolehan suara sebanyak 90.977 suara atau 27,80%. Posisi keempat ditempati paslon nomor urut 1, Muhammad Amin-Muhammad Saleh dengan perolehan suara sebanyak 19.505 suara atau 5,96%. Pada posisi kelima ditempati paslon nomor urut 4 Jawahir-Bardansyah Harahap dengan perolehan suara 11.597 suara atau 3,54 %.

Pada pemilihan kepala daerah, di desa Tanjung kecamatan Koto Kampar Hulu kabupaten Kampar tercatat jumlah tiap Desa yang mempunyai hak pilih adalah sebanyak 4027 orang dan di tambah 1 orang yang memilih di TPS 1 tepatnya di Desa Tanjung dari TPS lain sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 : Jumlah Penduduk Desa Yang Mempunyai Hak Pilih Dan Yang Tidak Memilih Dari Desa Tanjung Tahun 2017

| NO | Nomor TPS | Suara Sah | Suara Tidak Sah | Tidak Memilih | Jml Pemilih | | |
|-------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | L | P | L+P |
| 1 | 1 | 257 | 10 | 18 | 115 | 170 | 285 |
| 2 | 2 | 453 | 14 | 96 | 255 | 308 | 563 |
| 3 | 3 | 296 | 9 | 35 | 157 | 183 | 340 |
| 4 | 4 | 359 | 9 | 31 | 165 | 234 | 399 |
| 5 | 5 | 206 | 17 | 170 | 173 | 220 | 393 |
| 6 | 6 | 190 | 22 | 34 | 117 | 129 | 246 |
| 7 | 7 | 406 | 17 | 106 | 232 | 297 | 529 |
| 8 | 8 | 340 | 7 | 25 | 181 | 191 | 372 |
| 9 | 9 | 209 | 9 | 97 | 117 | 198 | 315 |
| 10 | 10 | 439 | 5 | 141 | 287 | 298 | 585 |
| TOTAL | | 3155 | 119 | 753 | 1799 | 2228 | 4027 |

Sumber : Panitia pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Kampar desa Tanjung 2017

Dari tabel diatas, dapat dilihat jumlah penduduk desa Tanjung berdasarkan

Desa yang memiliki hak pilih yaitu TPS 1, 285 orang yang memiliki hak pilih dan 18 orang yang tidak menggunakan hak pilih, TPS 2, 563 orang yang memiliki hak pilih dan 96 orang yang tidak menggunakan hak pilih, TPS 3, 340 orang yang memiliki hak pilih dan 35 orang yang tidak menggunakan hak pilih, TPS 4, 399 orang yang memiliki hak pilih dan 31 orang yang tidak menggunakan hak pilih, TPS 5, 393 orang yang memiliki hak pilih dan 170 orang yang tidak menggunakan hak pilih, TPS 6, 246 orang yang memiliki hak pilih dan 34 orang yang tidak menggunakan hak pilih, TPS 7, 529 orang yang memiliki hak pilih dan 106 orang yang tidak menggunakan hak pilih, TPS 8, 372 orang yang memiliki hak pilih dan 25 orang yang tidak menggunakan hak pilih, TPS 9, 393 orang yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki hak pilih dan 97 orang yang tidak menggunakan hak pilih, TPS 10, 585 orang yang memiliki hak pilih dan 141 orang yang tidak menggunakan hak pilih.

Adapun fenomena yang penulis dapat setelah melakukan pengamatan saat pemilihan kepala daerah di desa Tanjung antara lain:

1. Tahapan sosialisasi panitia pemiihan kepala daerah yang kurang kepada masyarakat sehingga informasi tentang akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah masih ada yang tidak diketahui masyarakat.
2. Masyarakat kuarang mengetahui visi dan misi masing-masing kandidat Kepala Daerah.
3. Partisispasi masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah kurang, hal ini penulis amati berdasarkan tabel I.1 diatas fakta masih besarnya jumlah masyarakat yang tidak ikut memilih/ tidak memberikan hak suaranya sewaktu pemilihan kepala daerah di desa Tanjung berlangsung hanya diikuti 3274 orang dari 4027 orang daftar pemilih tetap.
4. Masih adanya black campaing (Kampanye Hitam) hal ini dibuktikan dengan adanya pasangan kandidat saling menjatuhkan citra kandidat kepada masyarakat.
5. Disisi lain penulis juga menemukan adanya unsur Money Politic (politik uang) yang dilakukan oleh calon kepala daerah. Salah satu masalah besar yang sering menjadi persoalan dalam bermasyarakat adalah kecenderungan individu-individu dalam masyarakat mengabaikan hak yang dimiliki untuk sebuah kepentingan umum yang lebih tinggi. Pada umumnya masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan umum yang menyangkut kepentingan bersama. Adanya kesadaran yang rendah terhadap pentingnya menggunakan hak yang dimiliki mencerminkan ketidakpedulian individu-individu dalam masyarakat terhadap kehidupan masa depan seperti pemilihan kepala daerah di Kampar tahun 2017.

Penerapan sistem pemilihan umum di Indonesia masih terbilang belum sepenuhnya mampu merepresentasikan kehendak rakyat Indonesia. Pasca reformasi perubahan sistem pemilu yang sebelumnya menggunakan sistem pemilihan proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka memang relevan bagi sosio-kondisi Indonesia sendiri dan tuntutan rakyat untuk menyelenggarakan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan kata lain sangat diharapkan adanya transparansi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum. Penilaian sistem pemilu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu kondisi sistem ekonomi, kondisi lembaga-lembaga politik, proses pemungutan suara, proses pemilihan kepala daerah, tatacar pemilihan, tingkah laku masyarakat dalam memilih, partisipasi perempuan dalam partai politik, pendapat masyarakat mengenai demokrasi, dan munculnya masalah-masalah baru dalam pemilu. Kandidat yang maju telah diseleksi sebelumnya karena harus memenuhi persyaratan dan sistem sesuai peraturan yang berlaku. Sistem pemilu saat ini merencanakan banyak pemilu kepala daerah sehingga dalam melakukan proses pemungutan suara diperlukan informasi dan tatacara pemilu yang efektif kepada masyarakat luas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muncullah sebuah tawaran untuk penyelesaian permasalahan dalam proses pemilu khususnya dalam suatu daerah desa yaitu dengan pendidikan politik terpadu. Pendidikan politik terpadu merupakan jawaban intelektual dari persoalan pemilu yang semakin lama semakin tidak jelas arahnya dan semakin banyak penyimpangan yang terjadi. Pendidikan politik bagi pemilih perlu mendapatkan fokus yang jelas. Ini terkait dengan proses segmentasi pendidikan pemilih. Pemilih pemula merupakan segmentasi penting dalam upaya melakukan pendidikan bagi pemilih dan tentunya pendidikan bagi pemilih pemula ini tidak hanya dilakukan ketika masuk usia pilih. Kurangnya informasi penting mengenai proses pemilihan merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena hal ini harus dimengerti oleh masyarakat yang memilih dalam pemilu. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu diperlukan sumber informasi seperti brosur, iklan di media cetak/internet, surat-surat melalui pos, kampanye iklan di radio, poster, debat/dialog kandidat pemilu dan lain-lain. Jika pemilih secara keseluruhan sudah memiliki pengetahuan mengenai politik dan pemilu, bukan tidak mungkin korupsi dapat dihindarkan bahkan dihilangkan. Karena masyarakat akan menjadi pengawas atas segala penyelenggaraan kegiatan negara, sesuai dengan kedaulatan berada ditangan rakyat.

Berkaitan dengan Negara-negara baru Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No easy choice: political participation in developing countries* member tafsir yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak secara pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (Miriam, 2008:367).

Di Negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masadepan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi partisipasi politik merupakan pengecualian dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang abash oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya di perhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (*political efficacy*) (Miriam, 2008:368).

Dalam konteks islam, adapun ayat yang terkait dalam pendidikan politik dan partisipasi politik yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pembinaan dengan judul: "**Analisis Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Kampar Tahun 2017**".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan suatu permasalahan pokok dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Kampar Tahun 2017?"
2. Faktor yang menjadi hambatan dalam Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Kampar Tahun 2017?.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pengajuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisa Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Kampar Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan dalam Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Kampar Tahun 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi pemerintah kecamatan untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat Desa Tanjung untuk lebih menggunakan haknya untuk memilih Bupati di Kabupaten Kampar.
2. Sebagai Bahan informasi atau pedoman bagi masyarakat Desa Tanjung untuk tidak mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum yang menyangkut kepentingan bersama.
3. Hasil Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak yang memerlukan.
4. Penelitian ini berguna bagi peneliti berikutnya yang mau mengadakan penelitian yang sama.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini penulis menuangkan kedalam 6 (enam) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai teori-teori atau konsep yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan analisa data yang dikumpulkan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang Keadaan Umum Desa Tanjung, Geografi, Demografi, Sejarah, kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Desa Tanjung serta Struktur Organisasi Desa Tanjung.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam Bab ini memuat hasil dari penelitian pembahasan yang dilakukan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Administrasi

Istilah Administrasi Negara berasal dari bahasa latin *administrare* yang dalam bahasa Belanda diartikan sama dengan *besturen* yang berarti fungsi pemerintah. R.D.H. Kusumaatmadja dalam Ragawino (2006: 18) mengatakan bahwa Administrasi dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari dua arti : Dalam arti sempit : administrasi adalah kegiatan tulis meulis, catat mencatat dalam setiap kegiatan atau tata usaha. Dalam arti luas : administrasi adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2003;2). Sedangkan manajemen dalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para organisasi dan penggunaan sumberdayasumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 2003; 2). Kemudian untuk menjalankan kedua aktivitas administrasi dan manajemen diatas maka diperlukan sebuah wadah bernama organisasi. Organisasi dapat didefmisikan wadah atau wahana, kegiatan orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan (Hamim 2005; 13). Untuk mencapai tujuan kegiatan administrasi dan manajemen didalam organisasi maka perlu didukung berbagai sarana dan prasarana yang disebut sumberdaya organisasi yang meliputi Man, Method Machine, Market, dan Money.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara Administrasi Negara merupakan suatu bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga lembaga mulai disusun, digerakkan dan dikemudikan.

Adapun Sumber hukum dalam Administrasi negara adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum dan ditentukan aturan hukum itu. Sumber hukum dikenal dua macam yaitu Ragawino (2006: 20).

1. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi aturan hukum itu, dan untuk menentukan isi hukum itu dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu :

- a. Sejarah, yaitu undang-undang peraturan-peraturan masa lalu yang dianggap baik dapat dijadikan bahan untuk membuat undang-undang dan dapat diberlakukan sebagai hukum positif.
- b. Faktor Sosiologis, yaitu seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada didalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang terjadi didalam masyarakat dapat dijadikan bahan untuk membuat hukum dengan kata lain sesuai dengan perasaan hukum masyarakat misalnya keadaan dan pandangan masyarakat dalam sosial, ekonomi, budaya, agama dan psikologis.
- c. Faktor Filosofis, yaitu ukuran untuk menentukan aturan itu bersifat adil atau tidak dan sejauhmana aturan itu ditaati oleh warga masyarakat atau mengapa masyarakat mentaati aturan itu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Hukum Formil

Yaitu kaidah hukum dilihat dari segi bentuk, dengan diberi suatu bentuk melalui suatu proses tertentu, maka kaidah itu akan berlaku umum dan mengikat seluruh warga masyarakat dan ditaati oleh warga masyarakat.

Sumber hukum formil Hukum Administrasi Negara adalah :

- a. Undang-undang
- b. Kebiasaan/Praktek hukum administrasi Negara
- c. Yurisprudensi
- d. Doktrin/pendapat para ahli.

2.2. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik mampu melahirkan budaya politik yang sehat, yang hingga pada akhirnya berhasil mewujudkan masyarakat demokratis yang bebas dari bisa apapun. Politik yang sehat tentu menjadi syarat utama dalam menghasilkan masyarakat demokratis tersebut. Sebab, tanpa berjalannya politik yang sehat maka tentu masyarakat demokratis atau demokrasi itu sendiri kehilangan arahnya sehingga muncullah kebebasan yang tidak terkontrol yang pada akhirnya mencederai demokrasi itu sendiri. Disini lah sebenarnya relevansinya pendidikan politik sebagai upaya penguatan terwujudnya masyarakat demokratis, tentu melihat ini dalam konteks demokrasi yang berjalan merupakan sebuah keniscayaan dalam upaya mereorientasi pendidikan politik yang telah atau sedang berlangsung.

Menurut Prabowo (2010:4) Pendidikan politik (*political education*) adalah pendidikan kewarganegaran (*civic education*) untuk mengetahui tugas dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab sebagai warga negara atau lebih tepat lagi disebut pendidikan politik adalah pendidikan demokrasi (*democracy education*), pendidikan yang mewujudkan masyarakat demokratis, yaitu masyarakat yang bebas (*freesociety*) yang hanya dibatasi oleh kebebasan itu sendiri, bukan masyarakat kolektivisme yang “terpasung” oleh atribut-atribut agama atau norma-norma budaya.

Pendidikan politik adalah segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara) guna mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Pendidikan politik merupakan proses mempengaruhi individu agar dia mendapatkan informasi, wawasan dan ketrampilan politik sehingga sanggup berikap kritis dan lebih intesional terarah hidupnya. Selain itu bisa menjadi warga Negara yang lebih mantap, tidak terapung tanpa bobot dan tanpa pengaruh orientasi terhadap keadaan sendiri dan kondisi lingkungannya (Prabowo, 2010:4-5).

2.3. Indikator Pendidikan Politik

Terdapat tiga kemungkinan variasi pembelajaran terpadu yang berkenaan dengan pendidikan politik yang dilaksanakan dalam suasana pendidikan progresif yaitu:

1. Kurikulum terpadu (*integrated curriculum*)

Kurikulum terpadu adalah kegiatan menata keterpaduan berbagai materi mata pelajaran melalui suatu tema lintas bidang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna sehingga batas antara berbagai bidang studi tidaklah ketat atau boleh dikatakan tidak ada.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hari terpadu (*integrated day*)

Hari terpadu berupa perancangan kegiatan siswa dari sesuatu kelas pada hari tertentu untuk mempelajari atau mengerjakan berbagai kegiatan sesuai dengan minat mereka.

3. Pembelajaran terpadu (*integrated learning*).

Pembelajaran terpadu menunjuk pada kegiatan belajar yang terorganisasikan secara lebih terstruktur yang bertolak pada tema-tema tertentu atau pelajaran tertentu sebagai titik pusatnya (*center core / center of interest*), (Prabowo, 2010:6). Bappenas dan Depdagri (2002:18) pembelajaran terpadu adalah suatu proses pembelajaran dengan melibatkan/ mengkaitkan berbagai bidang studi. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan terpadu ini diharapkan akan dapat memperbaiki kualitas pendidikan dasar, terutama untuk mencegah gejala penjejalan kurikulum dalam proses pembelajaran.

2.4. Pengertian Partisipasi Politik

Menurut Thoha (2005:343), bahwa: “Partisipasi politik adalah suatu cara yang dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain”, pengambilan keputusan dalam politik adalah “seperangkat yang diambil individu atau kelompok dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan sebagai reaksi terhadap suatu masalah, masalah adalah suatu penyimpangan antara masalah dengan pemimpin.”

Menurut Keith Faus Partisipasi politik adalah “keterlibatan secara aktif dari individu atau kelompok kedalam proses pemerintahan”. Damsar (2010:179)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan demikian individu disini sangatlah berperan aktif dalam kegiatan pelaksanaan pemerintahan.

Menurut Herbert McClosky Partisipasi politik adalah “kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum”. Damsar (2010:180) Menurut Samuel P. Huntington Dan Joan M. Nelson Damsar (2010:180) Partisipasi politik adalah “kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah”.

Menurut Michael Rush Dan Philip Althoff Partisipasi politik adalah “Keterlibatan dalam aktifitas politik pada suatu sistem politik”. Damsar (2010:180) Batasan yang dikehendaki oleh Keith Faus serta Huntington dan Nelson memfokuskan pada suatu yang berhubungan dengan pemerintahan. Fokus tunggal seperti ini mengabaikan bahwa politik itu tidak hanya dengan pemerintahan saja, tetapi luas dari itu, yaitu meliputi berbagai aspek Kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, negara, konflik dan resolusi konflik, kebijakan pengambilan keputusan, dan pembagian atau alokasi.

Batasan yang dibuat oleh Herbert Mc Closky menekankan sesuatu yang tidak dicakup oleh ahli lain yaitu sifat sukarela. Itu berarti segala sesuatu peran serta yang bersifat selain sukarela seperti paksaan, keharusan atau kewajiban, melalui pandangan tersebut maka tidak bisa dikatakan sebagai partisipasi. Misalnya ketika semua anggota dari suatu komunitas diharapkan untuk pergi secara bersama-sama ke kecamatan untuk mempertanyakan kebijakan yang tidak



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adil terhadap komunitas mereka. Ketika harapan pergi bersama kekecamatan tersebut dipahami sebagai suatu kewajiban, seperti PNS diharapkan pilih Golkar pada masa rezim Orde Baru dimasa lampau, maka kegiatan seperti ini dipandang sebagai mobilisasi, bukan partisipasi.

Jadi ditekankan sekali bahwa yang sering digunakan oleh para ahli tentang peran serta yang bersifat paksaan, keharusan, atau kewajiban dikenal sebagai mobilisasi. Ketika suatu komunitas, mewajibkan warganya untuk memberikan sumbangan terhadap kepentingan publik, maka konsep sumbangan secara substansial adalah sesuatu yang bersifat sukarela berubah menjadi suatu aktivitas yang memaksa. Oleh sebab itu sumbangan wajib warga dari suatu komunitas tidak bisa dikategorikan sebagai partisipasi dalam kegiatan publik pada komunitas, namun lebih tepatnya sebagai mobilisasi kegiatan publik.

Apa yang dikemukakan oleh Herbert McClosky tentang karakteristik suarela dalam konsep partisipasi diatas sangat dipahami oleh Huntington dan Nelson. Untuk menemukan titik temu perbedaan konsep antara yang setuju dan tidak adanya karakter sukarela, maka Huntington dan Nelson mengusulkan dua konsep partisipasi, yaitu partisipasi mobilisasi dan partisipasi otonom. Partisipasi otonom menunjukkan partisipasi yang dilakukan secara sadar tanpa tekanan dan sukarela. Sedaangkan partisipasi mobilisasi menunjukkan sisi yang berseberangan dari yang dijelaskan pertama, yaitu tidak sadar, ada tekanan, atau ada unsur paksaan, sekecil apapun ia. (Damsar 2010:181-182)

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Didalam masyarakat tradisional, pemerintah dan politik biasanya hanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan urusan satu golongan elit yang kecil. Petani, tukang dan pedagang yang merupakan bagian penduduk yang paling besar dapat menyadari atau tidak bagaimana tindakantindakan pemerintah mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Akan tetapi biasanya tidak sampai terpikir oleh mereka bahwa mereka dapat atau perlu berusaha untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah, dan bukan sekedar sekali-kali mengajukan petisi minta bantuan terhadap tekanan dari luar sebaliknya, prinsip kewarganegaraan yang aktif sudah diterima dan ditekankan disemua negara industry yang modern, meskipun bentuk dan kodrat partisipasinya yang sah menunjukkan perbedaan-perbedaan yang besar satu sama lain.

Proses-proses yang dilalui untuk memperluas partisipasi, termasuk keseluruhan kekuasaan-kekuasaan sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi partisipasi dan juga saluran-saluran partisipasi yang lebih khusus yang mungkin menggerakkan individu-individu dan golongan-golongan yang tadinya berpartisipasi. Dalam jangka panjang, modernisasi sosial dan ekonomi menghasilkan partisipasi yang lebih luas. Akan tetapi proses-prosesnya tidak mantap, seragam atau tidak dapat diubah lagi. Beberapa negara memiliki tingkat-tingkat partisipasi yang jauh lebih tinggi dari pada apa nampaknya dapat dibenarkan oleh tahap-tahap perkembangan sosial, ekonomi mereka. Di negara-negara lain tingkatnya jauh lebih rendah. Demikian pula halnya dengan golongan-golongan didalam negara-negara itu.

Selain dari itu, tingkat partisipasi di dalam golongan atau negara-negara dapat merosot dengan tajam dan bentuk-bentuk partisipasi dapat berubah secara



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dramatis. Hubungan antara pertumbuhan atau modernisasi dan partisipasi politik adalah kompleks dan melalui sejumlah faktor tambahan. Samuel P. Huntington dan (Joan Nelson 1990:1-2)

Menurut Ragamalan Rafael (2001:147), bahwa: Partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik, namun kiranya perlu dicatat bahwa partisipasi politik pun berpengaruh terhadap sosialisasi politik yang berjalan”. Menurut Rush dan Althoff (2002) untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat pada kegiatan politik dapat dilihat berdasarkan hirarki partisipasi politik yang diikuti oleh masyarakat.

Apa yang telah dijelaskan Rush dan Althoff dari hirarki tersebut bahwa bentuk partisipasi politik secara umum dan luas serta lebih mudah di amati di lingkungan masyarakat kita ialah pemberian suara pada pemilu. Partisipasi politik dalam pemberian suatu tersebut ialah di pilih secara langsung anggota DPR/MPR, DPRD, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah baik provinsi maupun kab/ kota oleh masyarakat. Demokrasi rakyat menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umum nya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang di pilih oleh rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan kemakmuran rakyat.

Miriam Budiardjo (2008:367), Partisipasi politik “adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*Public Policy*)”.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kait dan Halz-Bach, “Partisipasi politik diartikan sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan politik”. (Hendry Subiakto, Rachmah Ida 2012: 64). Menurut Rosemberg Mensugestikan tiga alasan politik untuk menerangkan arti politik. Alasan pertama adalah konsekuensi yang ditanggung dari aktivitas politik. Hal ini dapat mengambil beberapa bentuk: Individu dapat merasa, bahwa aktifitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek hidupnya.

Umpamanya dia dapat mempercayai bahwa aktivitas politik itu dapat mengasingkan kawan dan para tetangganya, atau bahkan anggota keluarganya ia merasa bahwa posisi sosialnya bisa terganggu rusak, atau aktivitas politik dapat mengancam posisi pekerjaan karena terlalu dekat dengan satu partai atau pandangan tertentu atau dia dapat merasa bahwa aktivitas politik dapat mengancam atau merusak kehormatan dirinya dengan jalan mengungkapkan sebagai kebodohan sendiri, ketidak imbangan dan ketidak mampuan. Karena itu pada umumnya individu dihadapkan terhadap kontroversi atau tekanan-tekanan silang, maka ia beranggapan bahwa ketidak aktifan politik lebih cocok dari pada aktivitas politik.

Alasan Kedua bahwa individu dapat menganggap aktivitas politik sebagai sia-sia saja. Sebagai individu tunggal, dia mungkin merasa bahwa dia sama sekali tidak mampu mempengaruhi jalannya peristiwa, dan bahwa kekuatan politik yang bersifat bagaimanapun juga ada diluar kontrol individu. Tambah lagi, dia dapat beranggapan, bahwa hasil aktivitas politik merupakan satu kesimpulan yang telah lampau, dan malahan merasa bahwa dengan menggabungkan diri dengan orang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lain untuk mendapatkan suatu tujuan politik, adalah tidak berguna. Pada akhirnya, dia mungkin merasakan adanya suatu jurang pemisah antara ideal-idealnya dengan realitas politik, suatu pemisah sebagian besarnya, sehingga tidak ada sejumlah aktivitas politik yang kiranya bisa menjembatannya.

Alasan Ketiga seperti Milbart, Rosenberg beranggapan bahwa “memacu untuk bertindak” atau perangsang politik adalah faktor penting untuk mendorong aktifitas politik, dengan tidak adanya perangsang sedemikian itu dapat menambahkan perasaan apati. Individu mungkin merasa bahwa buah pikiran politik tidak terlalu menarik baginya, dan bahkan dapat memisahkan banyak kegiatan dari bidang politik, karena dia menerimanya sebagai hal yang lebih bersifat pribadi daripada politis. Selanjutnya dia mungkin merasa bahwa aktifitas politik menyajikan kepuasan sedikit atau kepuasan tidak langsung, sedang hasil langsung yang diperoleh sedikit sekali. Pokoknya partisipasi politik diterima sebagai hal yang sama sekali tidak layak bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan kebutuhan materiil individu. (Rush dan Althoff 2002:146-148).

Partisipasi politik pada khususnya tidaklah termasuk sulit untuk dikemukakan. S.M Lipset umpamanya dengan menggunakan sederetan studi dan data, telah memberikan uraian tentang berbagai aspek perilaku elektoral, termasuk di dalamnya hasil jumlah yang turut memberikan suara, petunjuk mengenai voting dan dukungan bagi gerakangerakan ekstrimis. Demikian pula studi voting yang mendalam di beberapa Negara memberikan bukti yang kuat untuk mendukung satu jajaran luas dari hipotesa hipotesa. Lebih khusus mengenai asosiasi antara status sosial-ekonomis dengan tingkah laku elektoral yang telah di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumentasikan secara luas dan banyak sekali perhatian yang telah dicurahkan kepada individu yang menyimpang dari norma voting kelas. Studi ini mengemukakan bahwa perilaku politik seseorang itu ditentukan oleh interaksi dari sikap sosial dan sikap politik individu yang mendasar, dan oleh situasi khusus yang dihadapinya. Rush dan Althoff (2002: 178-180).

Menurut Huntington dan Nelson Partisipasi politik dapat terwujud dalam dalam berbagai bentuk studi-studi tentang partisipasi dapat menggunakan skema-skema klasifikasi yang agak berbeda-beda”. Miriam Budiardjo (2010:367), namun kebanyakan riset belakangan ini membedakan jenis-jenis perilaku seperti berikut:

- a. Kegiatan pemilihan

Kegiatan pemilihan merupakan keterlibatan masyarakat desa mekarsari dalam proses pemberian suara, keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam panitia pemilihan kepala daerah (Bupati dan Wakil bupati, mkeaktifan masyarakat dalam menghimpun dan mencari dukungan suara untuk salah satu kandidat kepala daerah (bupati dan wakil bupati).

- b. Menghadiri rapat umum

Keterlibatan masyarakat dalam panitia pemilihan menghadiri rapat-rapat kepanitiaan pemilihan dan juga rapat tim sukses demi kelancaran pemilihan kepala daerah (bupati dan wakil bupati) di desa mekarsari kecamatan reteh kabupaten Kampar.

- c. Mengadakan hubungan (Contaction)

Merupakan tindakan aktif masyarakat terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan aparat desa dengan maksud memperoleh manfaat bagi salah satu tim sukses/ calon kepala daerah (bupati dan wakil bupati)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Lobby (*Lobbying*)

Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang seperti kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi atau oposisi terhadap suatu usul legislatif atau keputusan administratif tertentu.

2.5. Bentuk Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik itu dapat berwujud dalam berbagai bentuk antara lain: kegiatan pemilihan yang juga mencakup pemberian sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seseorang calon, lobbying, kegiatan organisasi, mencari koneksi dan tindakan kekerasan (*violence*), (Huntington & Nelson, 1990:20).

Menurut Almond di dalam buku Perbandingan sistem politik, Mohtar Masoed dan Collin Andrews (2008:56-57), bahwa: “Paling tidak terdapat 5 (lima) hal yang menyebabkan timbulnya kearah partisipasi lebih luas dan proses politik yaitu” :

1. Modernisasi.
2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial.
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern.
4. Konflik antara kelompok-kelompok politik dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Menurut Ragamarian Rafael (2007:135), bahwa: “Didalam partisipasi politik juga menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi politik dan sosialisasi politik yaitu” :

1. Sosialisasi politik adalah suatu proses bagaimana memperkenalkan system politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksi terhadap gejala-gejala politik, melalui sosialisasi politik maka individu-individu/ masyarakat di harapkan mampu dan mau berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik.
2. Bentuk-bentuk partisipasi politik adalah pemungutan suara untuk pemilihan para calon wakil rakyat, presiden, kepala daerah dan kepala desa. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat Desa Tanjung dalam politik adalah keterlibatannya dalam pemilihan kepala daerah secara langsung untuk memilih bupati dan waki bupati kabupaten Kampar periode 2017-2022.

Keterlibatan dalam dalam partisipasi politik tersebut dalam bentuk kampanye baik dalam partai maupun dalam kelompok tertentu, terlibat dalam tim sukses, melakukan sosialisasi serta memberikan hak suara pada pemungutan suara. Dalam pelaksanaan pemilu baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden/ Wakil presiden maupun pemilihan kepala daerah (bupati/ wakil bupati dan gubernur/ wakil gubernur), tingginya partisipasi masyarakat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam pemungutan suara. Semakin banyak jumlah suara dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung semakin tinggi pula



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipasi masyarakat dalam politik. Padahal sesungguhnya keterlibatan masyarakat dalam pemilihan langsung dinilai dari pendidikan politik masyarakat dengan lebih mengutamakan perlunya kebebasan berdemokrasi tanpa ada embel-embel lain seperti pembagian jabatan tertentu, pembagian proyek-proyek pemerintah dan lain-lain.

2.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Partisipasi politik ditentukan oleh sejumlah faktor, diantaranya adalah keyakinan agama, jenis kelamin, budaya politik dan karakter lingkungan politik. Faktor personal yang mempengaruhi partisipasi politik antara lain mencakup:

1. Derajat, perhatiannya atau motivasi yang dimiliki dalam partisipasi politik individu.
2. Tingkat kemampuan dan kecakapan, misalnya memikul tanggung jawab, mengambil keputusan, kemampuan memilih dan kesadaran politik kritis.
3. Keyakinan individu akan kemampuannya dalam mempengaruhi keputusan pemerintah.

Sementara itu Frank menemukan bahwa faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Maram (2007:156). Lindenfeld juga menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik. Dan orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemampuan ekonomi. Maram (2007:156).

Disamping faktor-faktor tersebut dapat disebutkan pula faktor-faktor lain seperti syarat legal bagi sistem pemilihan, sifat dari sistem partai, dan ciri



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepemimpinan yang dikembangkan oleh suatu partai politik. Syarat legal yang bermacam-macam akan membuat orang enggan untuk berpartisipasi dalam suatu aktifitas politik. Didalam masyarakat yang menerapkan sistem pembagian kelas yang cenderung kaku akan timbul partai-partai berdasarkan kelas. Lantas ciri kepemimpinan yang demokratis dan manusiawi lebih di dukung oleh berbagai kalangan, ketimbang ciri kepemimpinan yang otoriter. Maram, (2007:156-157).

Dari penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan utama yang mendorong seseorang untuk ikut berpartisipasi politik, pertama, faktor internal yang berkaitan dengan status sosial seseorang seperti pendidikan, pendapatan dan pekerjaan. Kedua, faktor eksternal antara lain peluang resmi, rangsangan politik yang datang dari lingkungan.

2.7. Konsep Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah proses demokrasi dimana terjadi pergantian kepemimpinan daerah pada tingkat lokal. Sarundajang (2011:117) mengatakan bahwa Pilkada sebagaimana pemilu nasional merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur. Melalui pilkada, rakyat akan secara langsung memilih pemimpinnya di daerah sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah, pilkada dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang absah (*legitimate*).

Selanjutnya Suharizal (2011:7) berpendapat secara filosofis munculnya gagasan tentang pilkada secara langsung itu pada dasarnya merupakan proses



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah-daerah yang sedang dimulai. Pilkada langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang kredibel dan didukung oleh rakyat.

Pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi.

2.8. Pandangan Islam terhadap Pemerintah

Islam adalah agama dan sekaligus sistem negara yang menjamin tegaknya keadilan dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Dalam merealisasikan tujuan tersebut, Alqur'an meletakkan kaidah dan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan negara dan pemerintahan seperti penegakkan keadilan, penerapan musyawarah, memperhatikan kesamaan, jaminan hak dan kebebasan berpendapat, dan penetapan solidaritas sosial secara komprehensif serta hubungan pemimpin dan rakyatnya seperti hak dan kewajiban timbal balik antara pemimpin dengan rakyatnya. Islam hanya meletakkan kaidah-kaidah umum dan tidak menetapkan bentuk ataupun aturan terperinci yang berkaitan dengan kepemimpinan dan pengelolaan negara. Adapun bentuk ataupun model pemerintahan beserta metode pengelolaannya menjadi ruang lingkup ijtihad dan proses pembelajaran kaum Muslimin dengan memperhatikan aspek kemaslahatan dan menyesuaikan perkembangan zaman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip-prinsip utama negara dalam perspektif Islam, lebih bijak jika kita menjelaskan kedudukan yang saling berkait dan vital negara dan pemerintahan dalam Islam. Prof. Muhammad al Mubarak dalam “Nizham al Islam: *al Mulk wad Daulah*” menjelaskan setidaknya terdapat enam alasan pentingnya kedudukan negara dan pemerintahan dalam Islam berdasarkan sumber dalam Alquran, Sunnah dan praktek Shahabat:

1. Alqur'an memiliki seperangkat hukum yang pelaksanaannya membutuhkan institusi negara dan pemerintahan. Diantara seperangkat hukum itu adalah hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan hudud dan qishas, hukum yang berkaitan harta benda (mal) serta hukum yang menyangkut kewajiban jihad.
2. Alquran meletakkan landasan yang kokoh baik dalam aspek aqidah, syari'ah dan akhlak yang berfungsi sebagai bingkai dan menjadi jalan hidup kaum Muslimin. Pelaksanaan dan pengawasan ketiga prinsip utama dalam peri kehidupan kaum Muslimin tidak pula membutuhkan intervensi dan peran negara.
3. Terdapat ucapan-ucapan Nabi yang dapat menjadi istidlal bahwa negara dan pemerintahan menjadi elemen penting dalam ajaran Islam. Ucapan-ucapan Nabi itu meliputi aspek imarah (kepemimpinan), al walayah (keorganisasian), al hukmu (kepemerintahan) dan al qadha (ketetapan hakim). Beberapa hadist itu diantaranya:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Al Imam adalah pemimpin rakyat dan ia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

“Barang siapa yang mati tidak terikat baiat maka matinya dalam mati jahiliyyah.” (HR. Muslim).

“Barangsiapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada imamnya, maka ia pada hari kiamat tidak memiliki hujjah.” (HR. Muslim).

4. Adanya perbuatan Nabi yang dapat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan tugas-tugas negara dan pemerintahan. Nabi mengangkat para gubernur, hakim, panglima perang, mengirim pasukan, menarik zakat dan rampasan perang, mengatur pembelanjaan, mengirim duta, menegakkan hudud, dan melakukan perjanjian dengan negara lain. R. Strothman dalam Encyclopedia of Islam mengatakan, *“Islam adalah fenomena agama politik sebab pendirinya adalah seorang Nabi dan sekaligus kepala Negara.”*
5. Setelah wafatnya Nabi, para shahabat menunda pemakaman Nabi dan bergegas bermusyawarah memilih pengganti (Khalifah) Nabi. Tindakan para shahabat ini menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan dalam Islam dan kesepakatan (ijma’) mereka dalam hal ini (mengangkat kepemimpinan pengganti Nabi) dapat menjadi sumber hukum Islam.
6. Hal ikhwah kepemimpinan (imarah) telah menjadi bagian kajian dan pembahasan para ahli fiqh didalam kitab-kita mereka disepanjang sejarah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khalifah adalah bentuk tunggal dari khulafa yang berarti menggantikan orang lain disebabkan ghaibnya (tidak ada di tempat) orang yang akan digantikan atau karena meninggal atau karena tidak mampu atau sebagai penghormatan terhadap apa yang menggantikannya. *Ar Roghib Al Asfahani* dalam *mufradat* mengatakan makna *kholafa fulanun fulanan* berarti bertanggung jawab terhadap urusannya secara bersama-sama dengan dia atau setelah dia. Dalam konteks firman Allah SWT dalam surat Al Baqoroh, ayat 20,

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya; “*Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah dimuka bumi*” (QS. Al Baqarah, ayat 20)

para mufasir menjelaskan bahwa khalifah Allah adalah para nabi dan orang-orang yang menggantikan kedudukan mereka dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, mengatur urusan manusia dan menegakkan hukum secara adil. Menurut Roghib Asfahani, penisbatan itu sendiri adalah bentuk penghormatan yang diberikan Allah SWT kepada mereka.

Khilafah (kepemimpinan) menjadi isu krusial dan tema sentral dalam sistem politik Islam. Sedemikian krusialnya isu itu membuat para shahabat menunda pemakaman Nabi untuk berkumpul di Bani Tsaqifah. Mereka bermusyarah untuk mengangkat pemimpin (Kholifah) pengganti Nabi. Secara umum, Alqu’ran mensyaratkan seorang pemimpin diangkat karena factor keluasan pengetahuan (*ilmi*) dan fisik (*jism*) seperti dijelaskan dalam Alqur’an:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT berfirman Al Baqarah, ayat 247):

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

Artinya; “Nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu.” mereka menjawab: “Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?” nabi menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.” Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. (QS. Al Baqarah:247).

Jadi ada tiga konteks makna keadilan yang dimaksudkan, yakni pertama, keadilan adalah sama dengan tidak membedakan seseorang dengan yang lainnya, kedua, keadilan berarti seimbang antara berbagai unsur yang ada dan ketiga, keadilan berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.

Keadilan menjadi prinsip dan tema utama dalam Al Qur'an. Perintah berbuat adil banyak dijumpai dalam Alqur'an surat An Nisaa', ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia [361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (QS.An Nisaa'135).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu dapat memperkaya teori yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Aris Riswandi Sanusi, Cecep Darmawan (2016) “Implementasi Pendidikan Politik Dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya Pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila (Studi Deskriptif terhadap Organisasi Kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat)”. Hasil dari penelitian ini adalah rangkaian pendidikan politik yang diselenggarakan GP Ansor Jawa Barat meliputi pendidikan dan pelatihan kader, pengembangan kader, promosi dan pendistribusian kader. Pendidikan dan pelatihan kader yang diselenggarakan PW GP Ansor Jawa Barat meliputi PKD dan PKL dengan materi pokok ke-NU-an, ke-Indonesia-an dan kebangsaan, manajemen organisasi, dan kepemimpinan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan pedagogi dan andragogi dengan metode pembelajaran yaitu ceramah, *brainstorming*, diskusi, *focus group discussion* (FGD), game dan dinamika kelompok, penugasan, studi kasus, praktek, *rihlah*/turun lapangan, dan pengamatan proses. Selanjutnya, pengembangan kader diorientasikan untuk mempersiapkan kader pada jenjang pendidikan kader yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan kompetensi dan potensi khusus kader pada bidang tertentu. Adapun promosi kader dilakukan dengan menempatkan kader pada struktur kepengurusan dan pendistribusian kader dilakukan dengan menempatkan kader



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada lembaga, instansi, dan profesi tertentu sesuai kapasitas kader dan kepentingan organisasi.

Marthen L. Kimbal (2018) “Partisipasi Politik dalam Proses Pembangunan Desa di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang partisipasi politik dalam pembangunan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian kualitatif dengan penelitian Deskriptif yang didasarkan pada. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman masyarakat pendidikan politik masih sangat rendah dan pendidikan politik dianggap sebagai alternatif untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat desa dalam demokrasi.

Kamaluddin (2016) “Pendidikan Politik Hubungannya Dengan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Labuaja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros (Analisis Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2015)”. Tujuan penelitian ini adalah sebagai salah satu pembelajaran bagi masyarakat Desa Labuaja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros sebagai sumber informasi bagi penulis setelah diketahui hasil tersebut. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, dimana peneliti melakukan penelitian lapangan, dengan maksud agar mendapatkan data riil di lapangan, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik. Dimana pendekatan-pendekatan politik itu ialah pendekatan legal/institusional, pendekatan perilaku Neo-Marxis, pendekatan pilihan rasional, dan pendekatan institusionalisme baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Desa Labuaja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros sangat ditentukan oleh dinamika masyarakatnya. Dinamika masyarakat di tentukan oleh berbagai aspek diantaranya aspek ekonomi, aspek politik, juga pengaruh sektor atau karismanya, sementara aspek primordial juga ikut menentukan tingkat partisipasi warga dalam pilkada.

Berdasarkan penelitian sebelumnya peneliti mencoba meneliti tentang Analisis Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Kampar Tahun 2017. Dimana permasalahannya adalah Masyarakat kurang mengetahui visi dan misi masing-masing kandidat Kepala Daerah, partisipasi masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah kurang, hal ini penulis amati berdasarkan tabel I.1 diatas fakta masih besarnya jumlah masyarakat yang tidak ikut memilih/ tidak memberikan hak suaranya sewaktu pemilihan kepala daerah di desa Tanjung berlangsung hanya diikuti 3274 orang dari 4027 orang daftar pemilih tetap.

2.10. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka pikiran penelitian tentang Analisis Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

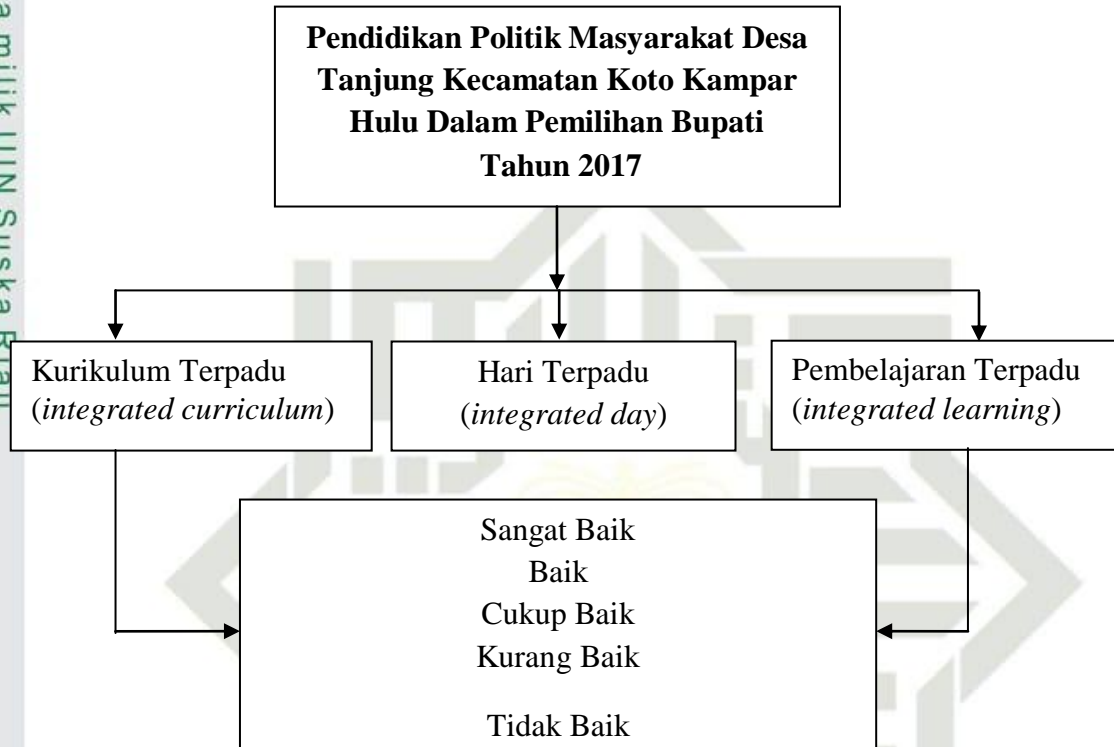


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II.1: Kerangka Pikiran Analisis Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2017



Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2018

2.11. Konsep Operasional

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Analisis Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2017

| Variable | Indikator | Sub Indikator | Skala Pengukuran |
|---|---|--|--------------------------|
| Terdapat tiga variasi pembelajaran terpadu yang berkenaan dengan pendidikan politik yang dilaksanakan dalam | 1. Kurikulum Terpadu (<i>integrated curriculum</i>) | a. Adanya kejelasan dalam memilih yang diajarkan a. Adanya koordinasi dalam pilkada oleh pengurus pilkada kepada masyarakat | Kualitatif/ Wawancara |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| Variable | Indikator | Sub Indikator | Skala Pengukuran |
|-------------------------------------|--|--|------------------|
| suasana pendidikan progresif yaitu: | 2. Hari Terpadu (<i>integrated day</i>) | a. Berpartisipasi dalam memilih b. Memiliki pengetahuan | |
| | 3. Pembelajaran Terpadu (<i>integrated learning</i>) | a. Adanya pemahaman tentang hak dalam memilih b. Adanya kewajiban bermasyarakat dalam memilih | |

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2018

2.12. Defenisi Konsep

Untuk memperjelas atau menghindari kesalah pahaman beberapa konsep atau istilah pada penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan konsep tersebut dengan mengoperasionalkan batasan sebagai berikut :

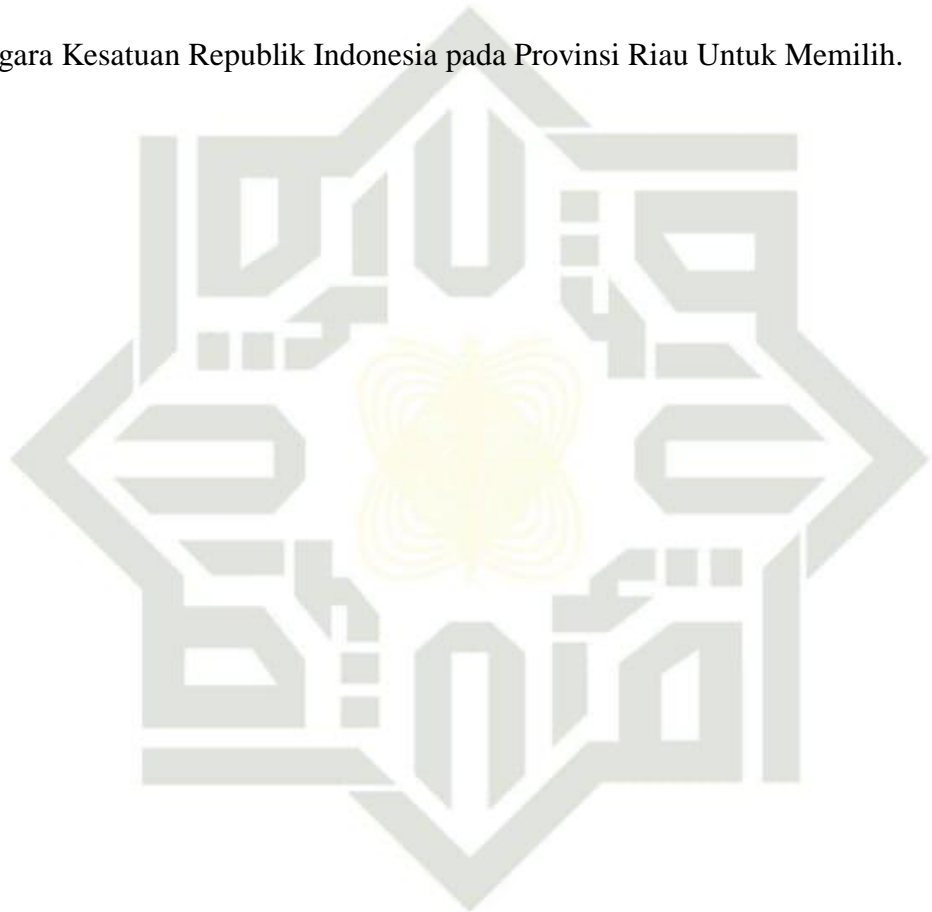
1. Analisis adalah menganalisa suatu objek yang akan diteliti.
2. Pendidikan politik adalah segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara) guna mengetahui hak-hak dan kewajibannya.
3. Masyarakat adalah sejumlah orang yang bersama-sama menjadi anggota suatu negara, yang harus di bina dan di layani oleh administrasi public setempat
4. Pemilihan umum adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

5. Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di laksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Provinsi Riau Untuk Memilih.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar pada tanggal 01 September sampai 30 Oktober tahun 2018. Alasannya penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu karena wilayah di Desa ini merupakan daerah yang cukup pesat perkembangan penduduknya di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dan lokasi ini terdapat hal menarik untuk dijadikan objek penelitian karena banyak dari masyarakat Desa Tanjung yang tidak Menggunakan hak suaranya dengan baik dan benar. Oleh karena itu di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu ini tepat untuk dijadikan lokasi penelitian.

3.2. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis

Jenias penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penelitian bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti subjek penelitian atau informan dalam lingkungan hidup kesehariannya.

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang penulis kumpulkan sendiri dari pihak ketiga dengan cara menyebarkan Quisioner dan wawancara langsung kepada responden yang terpilih.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data Sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari pihak ketiga tidak secara langsung, dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian ini, serta melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang relevan serta literatur lainnya.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara :

1. Wawancara atau *interview* yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Kuisisioner (Angket) yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan tertulis yang dibagikan kepada responden untuk diisi yang sesuai dengan keperluan penelitian.
3. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang khas dan erat hubungan dengan penelitian ini.
4. Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan atau pengambilan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan lokasi Penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi dari objek atau subjek yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2005 : 90).

Dalam pengambilan data yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah kepala desa Tanjung, panitia pelaksana pilkada di desa Tanjung 3 orang dan masyarakat 46 orang. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Porposive sampling* yaitu sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

| No | Jabatan | Populasi | Sampel |
|--------|--|------------|----------|
| 1 | Kepala Desa | 1 orang | 1 orang |
| 2 | Panitia Pelaksana PILKADA | 3 orang | 3 orang |
| 2 | Masyarakat Desa Tanjung yang mengikuti pilkada | 4023 orang | 46 orang |
| Jumlah | | 4027 orang | 50 orang |

Sumber: Olahan Data 2018

3.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini tergolong kedalam deskriptif kualitatif yaitu, menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian diuraikan dalam bentuk tabel dan selanjutnya diuraikan sesuai dengan identitas responden masing-masing serta indikator variable dan data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan (Hartono, 2011:98).

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan, maka untuk menelaah atau menentukan tingkat ketepatan permasalahan dalam penelitian ini digunakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisa persentase, yaitu penghitungan rata-rata persentase berdasarkan instrumen yang ditentukan dengan rumus :

Adapun tehnik analisa data dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus persentase sebagai berikut:

$$p = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

f = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu)

P = Angka persentase

100% = Bilangan Tetap (Sudijono, 2004:43)

Dalam menentukan kriteria penilaian, maka dilakukan pengelompokan atas 4 kriteria penilaian yaitu berkembang sangat baik, berkembang sesuai harapan, mulai berkembang dan mulai berkembang. Adapun kriteria persentase tersebut yaitu sebagai berikut;

1. Analisis pendidikan politik masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Kampar tahun 2017, untuk pengukuranya dengan 3 indikator yang dinilai dari 50 responden dengan skor tertinggi 750 dan skor terendah 150 dengan interval 120 dapat dinyatakan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sangat Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner berada pada interval 630-750

Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisisioner berada pada interval 629-509

Cukup Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisisioner berada pada interval 508-388

Kurang Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisisioner berada pada interval 387-267

Tidak Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisisioner berada pada interval 266-146



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Kecamatan Koto Kampar

Kecamatan Koto Kampar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2013 Tanggal 03 Juli 2013,. Kecamatan ini tergolong kepada kecamatan yang baru berdiri yang diresmikan pada tanggal 16 Desember 2006. Luas Wilayah Kecamatan Koto Kampar seluas 13.088 Ha. Kecamatan Koto Kampar terletak antara 00.300 LU sampai 00.20.00 LU dan 100.55.00 BT sampai 101.05.00 dan berada di 450.475 meter diatas permukaan laut. Daerah ini dialiri sungai kampar dan sungai-sungai kecil lainnya. Tanah yang subur menjadikan sektor pertanian dan perkebunan komoditi utama masyarakat.

Adapun visi Kantor Camat Koto Kampar kabupaten Kampar yaitu: “Mewujudkan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025”.

Dan misi-misinya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan lingkungan dalam bingkai budaya luhur masyarakat Kabupaten Kampar
2. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam rangka pengelolaan asset daerah, pembangunan dan pelayanan masyarakat
3. Pembangunan ekonomi rakyat yang berbasis pertanian dan sumber daya local dengan orientasi dan agroindustri



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antar swasta, masyarakat dan pemerintah baik berkala local dan regional maupun internasional

4.2 Kondisi Geografis Desa Tanjung

Desa Tanjung termasuk desa yang tertua di Kecamatan XIII Koto Kampar yang merupakan kecamatan induk sebelum terjadinya pemekaran Kecamatan Koto Kampar Hulu. Desa Tanjung sudah ada sebelum keberadaan Kerajaan Muara Takus, sejarah juga mengatakan pembangunan Candi Muara Takus juga melibatkan masyarakat Desa Tanjung, dapat disimpulkan berdirinya Desa Tanjung sebelum abad ke 7 (tujuh) sebelum tahun 600 M. Sekarang Desa Tanjung masuk dalam kecamatan pemekaran yaitu Kecamatan Koto Kampar Hulu, yang di resmikan oleh Bupati Kampar Drs. Burhanuddin, MM pada hari Jum'at Tanggal 11 Juni 2010 Dn Desa Tanjung menjadi ibukota kecamatan pemekaran tersebut.

Kantor Kepala Desa Tanjung berjarak 2 km dari kantor Kecamatan Koto Kampar Hulu, dan jarak dengan ibu kota kabupaten 60 km. Sedangkan jarak dengan ibu kota propinsi 120 km. Desa Tanjung awalnya bernama Ujung Tanjung yang diberi nama oleh Datuk Godang Cincin, yang menurut sejarah beliau adalah pendiri Desa Tanjung (sebelum abad ke 7) karena :

- a. Desa Tanjung dikelilingi oleh Sungai Kampar (daratan yang menonjol ke sungai)
- b. Adanya sebatang Bunga Tanjung yang terletak di tengah-tengah Desa Tanjung yang di perkirakan sudah ada semenjak adanya Desa Tanjung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena adanya evolusi oleh masyarakat sering disebut dengan nama tanjung sehingga nama tersebut suda melekat hingga sekarang. Desa tanjung memiliki luas wilayah 30 km x 25 km, sedangkan yang dijadikan pemukiman 4 km x 3 km. Adapun suhu udara berkisar 21 C” sampai 34 C” dengan curah hujan 2000 milimeter sampai 3000 milimeter per tahun. Ditinjau dari batas wilayah, Desa Tanjung berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pongkai dan Desa Tabing.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Bungsu dan Desa Muara Takus.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Takus dan Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat).
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tabing dan Nagari Muara Paiti Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat).

Dalam struktur sehari-hari mengenai kewilayahan, disamping wilayah administratif pemerintahan desa, Desa Tanjung juga di kenal dengan hukum adat, yang dikenal dengan tanah ulayat yang dikuasai oleh ninik mamak untuk kepentingan cucu kemenakan.

Adapun ulayat Desa Tanjung secara umum berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan ulayat ninik mamak Desa Tabing dan Desa Gunung Malelo.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ulayat ninik mamak Desa Muara Takus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ulayat ninik mamak Desa Muara Takus dan kenegerian ninik mamak Gunung Malintang dikabupaten 50 Kota (Sumatera Barat).
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan ulayat ninik mamak Desa Tabing dan ninik mamak Kenagarian Muara Paiti Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat).

4.3 Kondisi Demografis Desa Tanjung

Demografis (kependudukan) Desa Tanjung dengan jumlah penduduk 5.205 jiwa dan jumlah kepala keluarga 1.467 dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Menurut Jenis Kelamin

Tabel IV.1
Jumlah Penduduk Desa Tanjung Menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|----|---------------|-------------------|-----------------|
| 1. | Laki-laki | 2.686 jiwa | 51,37 % |
| 2. | Perempuan | 2.517 jiwa | 48,60 % |
| | Jumlah | 5.205 jiwa | 100,00 % |

Sumber :Daftar Perkembangan Penduduk Desa Tanjung Tahun 2018

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa penduduk terbanyak Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 2.686 jiwa atau 51,37% dari seluruh jumlah penduduk.

- b. Menurut Suku

Tabel IV.2
Jumlah Penduduk Desa Tanjung Menurut Suku

| No | Suku | Jumlah | Persentase |
|----|----------------------|-------------------|-----------------|
| 1. | Melayu/penduduk asli | 5.088 jiwa | 98,57 % |
| 2. | Minang | 68 jiwa | 0,93 % |
| 3. | Batak | 24 jiwa | 0,26 % |
| 4. | Jawa | 25 jiwa | 0,22 % |
| | Jumlah | 5.205 jiwa | 100,00 % |

Sumber :Daftar Perkembangan Penduduk Desa Tanjung Tahun 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penduduk Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar terdiri dari 4 (empat) suku, yaitu : Melayu, Minang, Batak, dan Jawa. Dimana suku Melayu yang merupakan penduduk asli adalah mayoritas yaitu sebanyak 5.088 jiwa dari 5.205 jiwa seluruh penduduk (tabel 4.2) .

c. Menurut Jumlah Pemilih (Pemilu)

Penduduk Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar berpartisipasi dalam perhelatan demokrasi yaitu dengan cara menyalurkan hak pilihnya. Berikut adalah rincian jumlah penduduk Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang menyalurkan hak pilihnya dalam berbagai perhelatan demokrasi :

Tabel IV.3
Penduduk Desa Tanjung Yang Menyalurkan Hak Pilih

| No | Nama Pemilihan | Jumlah Pemilih |
|----|-------------------------------|----------------|
| 1. | Pemilihan Kepala Desa | 3.500 jiwa |
| 2. | Pemilihan Umum (Legislatif) | 3.300 jiwa |
| 3. | Pemilihan Bupati | 3.200 jiwa |

Sumber :Daftar Perkembangan Penduduk Desa Tanjung Tahun 2018

d. Menurut Mata Pencapaian

Dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari penduduk Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar bekerja dalam berbagai bidang mata pencapaian. Berikut adalah rincian jumlah penduduk Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan mata pencapaian :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.4

Jumlah Penduduk Desa Tanjung Menurut Mata Pencaharian

| No | Jenis Mata Pencaharian | Jumlah | Persentase |
|----|------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. | Petani | 2.745 jiwa | 51,21 % |
| 2. | Pedagang | 366 jiwa | 8,70 % |
| 3. | Buruh/Jasa | 260 jiwa | 6,25 % |
| 4. | Pegawai Negeri Sipil | 110 jiwa | 1,85 % |
| 5. | Pegawai Swasta | 77 jiwa | 1,26 % |
| 6. | TNI/POLRI | 28 jiwa | 0,47 % |
| 7. | Belum bekerja | 1619 jiwa | 30,21 % |
| | Jumlah | 5.205 jiwa | 100,00 % |

Sumber :Daftar Perkembangan Penduduk Desa Tanjung Tahun 2018

e. Agama

Tabel IV.5

Jumlah Penduduk Desa Tanjung Menurut Agama

| No | Agama | Jumlah | Persentase |
|----|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. | Islam | 5.205 jiwa | 100,00 % |
| 2. | Kristen Katholik/Protestan | - | - |
| 3. | Hindu | - | - |
| 4. | Budha | - | - |
| | Jumlah | 5.205 jiwa | 100,00 % |

Sumber :Daftar Perkembangan Penduduk Desa Tanjung Tahun 2018

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa penduduk Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar seluruhnya beragama Islam.

f. Tingkat Pendidikan

Tabel IV.6

Jumlah Penduduk Desa Tanjung Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|----|------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. | Tamatan SD | 2.420 jiwa | 47,69 % |
| 2. | Tamatan SMP Sederajat | 642 jiwa | 12,00 % |
| 3. | Tamatan SMA Sederajat | 440 jiwa | 8,76 % |
| 4. | Tamatan Perguruan Tinggi | 125 jiwa | 2,15 % |
| 5. | Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD | 138 jiwa | 4,10 % |
| 6. | Belum Sekolah | 1.440 jiwa | 25,28 % |
| | Jumlah | 5.205 jiwa | 100,00 % |

Sumber :Daftar Perkembangan Penduduk Desa Tanjung Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam tabel 4.6 menunjukkan bahwa sebanyak 1.440 jiwa penduduk Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah belum sekolah. Penduduk yang belum sekolah terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu penduduk yang sudah cukup umur namun tidak sekolah dan penduduk yang belum cukup umur untuk sekolah.

4.4 Sarana dan Prasarana Desa Tanjung

Sebagai penunjang dalam menjalankan aktifitas masyarakat sehari-hari maka diperlukan sarana dan prasarana penunjang agar yang menjadi keperluan serta kepentingan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Berikut adalah beberapa rincian mengenai sarana dan prasarana yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar :

- a. Potensi Dan Luas Lahan Produksi Tanah Pertanian

Tabel IV.7
Potensi Dan Luas Lahan Produksi Tanah Pertanian Desa Tanjung

| No | Jenis Potensi | Luas Lahan | Yang Produksi | Keterangan |
|-----|-----------------------|------------|---------------|-------------|
| 1. | Perkebunan Karet | 4.500 HA | 225 HA | - |
| 2. | Perkebunan Gambir | 1.500 HA | 1.000 HA | - |
| 3. | Perkebunan Jeruk | 150 HA | - | - |
| 4. | Persawahan | 250 HA | 50 HA | - |
| 5. | Palawija | 200 HA | 55 HA | Cabe, Sayur |
| 6. | Kolom dan Keramba | 12 HA | 6 HA | - |
| 7. | Hutan Produksi | 2.500 HA | - | Tebang Liar |
| 8. | Lahan Tidur | 800 HA | 250 HA | Diusulkan |
| 9. | Galian C (SIRTU) | 350 HA | 0 HA | - |
| 10. | Industri Rumah Tangga | 7 Unit | 5 HA | - |
| 11. | Batubara | 0 HA | 0 HA | - |
| 12. | Sawit | 250 HA | 125 HA | - |

Sumber :Daftar Perkembangan Penduduk Desa Tanjung Tahun 2017

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa lahan yang berada di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar terluas digunakan sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkebunan karet yaitu seluas 4.500 HA akan tetapi yang berproduksi adalah seluas 225 HA.

b. Jumlah Sarana Rumah Ibadah

Seluruh penduduk Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah beragama Islam sehingga sarana ibadah yang ada adalah masjid dan musholla. Berikut adalah rincian jumlah masjid dan musholla yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar :

Tabel IV.8
Jumlah Sarana Ibadah Desa Tanjung

| No | Sarana Ibadah | Jumlah |
|----|---------------|-----------|
| 1. | Mesjid | 4 |
| 2. | Musholla | 10 |
| | Jumlah | 14 |

Sumber :Daftar Perkembangan Penduduk Desa Tanjung Tahun 2018

c. Sarana Objek Wisata

Berikut adalah tabel sarana objek wisata Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar :

Tabel IV.9
Jumlah Sarana Objek Wisata Desa Tanjung

| No | Objek Wisata | Jumlah |
|----|---|--------|
| 1. | Air Terjun Panisan | 1 |
| 2. | Batu Hidung Muara Kapur | 1 |
| 3. | Pulau Diambai (Lokasi Perkemahan dan Balimau Kasai) | 1 |
| 4. | Pulau Petai (Hamparan Batu dan Pasir) | 1 |
| 5. | Gua Tanah Berdengung | 1 |

Sumber :Daftar Perkembangan Penduduk Desa Tanjung Tahun 2018

d. Jumlah Organisasi Keagamaan

Dalam bermasyarakat untuk meningkatkan keakraban serta kemampuan dalam memahami agama maka di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar telah berdiri beberapa organisasi keagamaan yang semuanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah organisasi agama Islam. Berikut adalah rincian jumlah organisasi keagamaan yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar :

Tabel IV.10
Jumlah Organisasi Keagamaan Desa Tanjung

| No | Organisasi | Jumlah |
|----|---|-----------|
| 1. | Taman Pendidikan Alqur'an | 13 |
| 2. | Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) | 1 |
| 3. | Ikatan Remaja Mesjid | 1 |
| 4. | Wirid Pengajian/Yasinan Kaum Ibu | 11 |
| 5. | Majelis Taklim | 4 |
| 6. | Wirid Zikir dan Marhaban | 3 |
| 7. | Lembaga Didikan Subuh | 1 |
| | Jumlah | 34 |

Sumber :Daftar Perkembangan Penduduk Desa Tanjung Tahun 2018

e. Jumlah Sarana Pendidikan

Dalam menunjang peningkatan ilmu pengetahuan masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar maka didirikan sekolah sesuai dengan tingkatan yang ada, termasuk taman pendidikan Al-Quran.

Berikut adalah rincian jumlah sarana pendidikan yang ada :

Tabel IV.11
Jumlah Sarana Pendidikan Desa Tanjung

| No | Nama Sarana Pendidikan | Jumlah | Keterangan |
|----|---------------------------------|-----------|------------|
| 1. | Sekolas Menengah Atas (SMA) | 1 | Negeri |
| 2. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 1 | Negeri |
| 3. | Sekolah Dasar (SD) | 3 | Negeri |
| 4. | Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) | 3 | Swasta |
| 5. | Taman Pendidikan Alqur'an (TPA) | 13 | Swadaya |
| 6. | TK | 1 | Swasta |
| 7. | PAUD | 1 | Swasta |
| | Jumlah | 23 | |

Sumber :Daftar Perkembangan Penduduk Desa Tanjung Tahun 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Pemerintahan Desa Tanjung

Sebagai wujud dari tata kelola wilayah yang baik serta tertib dalam administrasi maka telah disusun aparatur pemerintahan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Berikut ini adalah susunan struktur pemerintahan yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar :

a. Struktur Pemerintahan Desa

Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dibantu oleh beberapa orang dengan bidang urusan tertentu. berikut adalah nama-nama serta bidang urusan yang tersusun dalam struktur pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar :

Tabel IV.12
Struktur Pemerintahan Desa Tanjung

| No | Nama | Jabatan |
|----|-------------------|--------------------------|
| 1. | SUTOMI | KEPALA DESA |
| 2. | RUSLI MUNIR | SEKRETARIS DESA |
| 3. | ABDUL RAHMAN | KASI PEMERINTAHAN |
| 4. | PITRIADI | KASI PEMBANGUNAN |
| 5. | PITRA HAYATI | KASI KESEJAHTERAAN |
| 6. | MELLY DWI SAPUTRI | KAUR KEUANGAN |
| 7. | SRI WAHYUNI | KAUR TATA USAHA DAN UMUM |
| 8. | M. SHOLEHAN | BENDAHARA DESA |

Sumber :Daftar Perkembangan Penduduk Desa Tanjung Tahun 2018

b. Daftar Nama Kepala Dusun

Dibawah pemerintahan desa adalah dusun. Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar terdiri dari 7 (tujuh) dusun yang masing-masing dipimpin oleh kepala dusun. Berikut adalah daftar nama kepala dusun yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.13

Daftar Nama Kepala Dusun Desa Tanjung

| No | Nama | Jabatan |
|----|-----------------|------------------|
| 1. | HADISMAN | Kepala Dusun I |
| 2. | EDI SISWARIANTO | Kepala Dusun II |
| 3. | JAMAHAR | Kepala Dusun III |
| 4. | IDAMRA | Kepala Dusun IV |
| 5. | HARDIANTO | Kepala Dusun V |
| 6. | ZAINAL | Kepala Dusun VI |
| 7. | ARIO SUSANTO | Kepala Dusun VII |

Sumber :Daftar Perkembangan Penduduk Desa Tanjung Tahun 2018

- e. Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tabel IV.14

Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung

| NO | NAMA | JABATAN | PERWAKILAN |
|-----|---------------------------|------------|------------------|
| 1. | MUKTAR LUBIS | KETUA | TOKOH MASYARAKAT |
| 2. | KATON, SH.I | WK. KETUA | TOKOH PEMUDA |
| 3. | ASRUL | SEKRETARIS | TOKOH ADAT |
| 4. | AJIS. S | ANGGOTA | TOKOH AGAMA |
| 5. | NURBAITI. N | ANGGOTA | TOKOH WANITA |
| 6. | SYAHRIAL | ANGGOTA | DUSUN I |
| 7. | MUHARLIS | ANGGOTA | DUSUN II |
| 8. | ALISMAN | ANGGOTA | DUSUN III |
| 9. | KASMI | ANGGOTA | DUSUN IV |
| 10. | M. NASIR | ANGGOTA | DUSUN V |
| 11. | ERWAN | ANGGOTA | DUSUN VI |
| 12. | USMAN DT. PADUKO BESAR | ANGGOTA | NINIK MAMAK |
| 13. | DESTO ANTONI DT. MANGKUTO | ANGGOTA | NINIK MAMAK |
| 14. | SYAMSUL DT. GINDO | ANGGOTA | NINIK MAMAK |
| 15. | ANAR DT. MAJO BESAR | ANGGOTA | NINIK MAMAK |
| 16. | BASIR DT. JALELO | ANGGOTA | NINIK MAMAK |

Sumber :Daftar Perkembangan Penduduk Desa Tanjung Tahun 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan maka pada bab ini dapat diambil kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan yang berkepentingan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pendidikan politik masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2017 menggunakan hak suara mereka Terbilang baik karena masyarakat ikut serta dalam pendidikan serta partisipasi politik masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2017 tersebut memahami apa itu pendidikan politik, yaitu pada indikator:

- a. Kurikulum Terpadu (*integrated curriculum*)

Kurikulum Terpadu (*Integrated Curriculum*) Dalam Analisis Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2017 sudah bisa dikatakan cukup, karena masyarakat mendapatkan kejelasan dan mendapatkan koordinasi dalam pilkada oleh pengurus pilkada. Dan menurut data dari tabel di atas Kurikulum Terpadu (*Integrated Curriculum*) Dalam Analisis Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hulu Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2017 berada pada interval 388-508 (cukup baik).

b. Hari Terpadu (*integrated day*)

Hari Terpadu (*Integrated Day*) dalam Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2017 sudah bisa dikatakan cukup baik, karena masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam pemilihan bupati tahun 2017 ikut berpartisipasi dan memiliki pengetahuan tentang pilkada yang dikoordinasi oleh pengurus pilkada. Menurut data dari tabel di atas Hari Terpadu (*Integrated Day*) dalam Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2017 berada pada interval 388-508 atau cukup baik.

c. Pembelajaran Terpadu (*integrated learning*)

Pembelajaran Terpadu (*Integrated Learning*) dalam Analisis Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2017 sudah bisa dikatakan cukup baik, karena adanya pembelajaran terpadu dari pengurus pilkada kepada masyarakat dalam pemilihan Bupati tahun 2017. Menurut data dari tabel di atas Pembelajaran Terpadu (*Integrated Learning*) berada pada interval 388-508 atau cukup baik

2. Hambatan dalam melakukan Analisis Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2017 Kurangnya kinerja para petugas dalam menjalankan tugasnya sebagai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanggung jawab terhadap pekerjaannya.

6.2. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah;

1. Sebaiknya masyarakat lebih berkreasi dalam artian menggunakan hak suaranya dengan baik bukan memilih untuk golput tidak memilih, bukannya itu masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu harus mengerti apa arti penting pendidikan politik itu sebenarnya, juga tingkat kesadaran masyarakat mengenai pendidikan politik itu harus dibangun.
2. Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu juga sebaiknya ikut memeriahkan pilkada seperti ikut memilih di TPS, menjaga keamanan agar tetap kondusif dan bagi para pemilih sebaiknya memilih calon Bupati dan Wakil Bupati bukan karena materi atau adanya keterkaitan hubungan keluarga atau asal daerah calon Bupati dan Wakil Bupati akan tetapi melihat bagaimana kemampuan dan prestasi calon tersebut di masyarakat sehingga pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya masyarakat dapat memilih calon yang tepat, serta harus adanya pendidikan tentang politik dan pilkada di masyarakat.
3. Kepada para pengurus atau panitia pilkada agar lebih meningkatkan kinerja dan kedisiplinannya dalam bekerja sehingga pemilihan bupati di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu tersebut dapat tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas dan Depdagri. 2002. *Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta Kencana Media Group.
- Henry Subiakto, Rachmah Ida. 2012. *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*, Jakarta: Kencana Media Group.
- Janedjri M. Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press (konpress)
- Leo Agustino. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Michael Rush dan Philip Althoff. 2002. *Pengantar Sosiologi dan Politik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Miftah Thoha. 2005. *Perilaku Organisasi Dan Konsep Dasar*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Miriam Budiardjo. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh Mahfud MD, SH, S.U. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mohtar Mas'ood, Colin Mac Andrews. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhamad Labolo. 2010. *Meemahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Prabowo. 2010. *Pembelajaran Fisika Dengan Pendekatan Terpadu Dalam Menghadapi Perkembangan IPTEK Millenium III*. Jakarta: Himpunan Fisika Indonesia.
- Rafael Raga Maram. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ragawino Bewa, 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Universitas Padjadjaran Pers.
- Samuel P. Huntington, Joan M. Nelson. 1990. *Partisipasi politik Di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarundajang. 2011. *Politik Pencitraan*. Jakarta: Gaung Persada Press.

Soejono Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sondang P. Siagian. 2003. *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

Sudijono Sastroatmodjo, 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: Ikip Semarang Press.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.

Suharizal. 2012. *Pemilukada*. Jakarta: Rajawali Pers.

T. Hani Handoko. 2008. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta. BPFE. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Widjanarto Puspoyo. 2012. *Dari Soekarno Hingga Yudhoyono*, Solo: Era Adicipta Intermedia.

<http://jurnal.umrah.ac.id/?tag=partisipasi-politik> (Jurnal Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik).

Jurnal Ilmiah Dinamika Vol. 1 No. 1 Juni 2008 ISSN 1979 – 0899X Peranan Opinion Leader Dalam Meningkatkan Peran Politik Masyarakat Perdesaan dalam Pembangunan.

Peraturan Pemerintah

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1: Daftar Angket Penelitian

I. Identitas Peneliti

Nama :
 NIM :
 Jurusan : Administrasi Negara (ANA)

II. Petunjuk Pengisian :

1. Diharapkan data responden mohon diisi dengan identitas saudara/i
2. Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/I anggap benar
3. Isilah titik – titik (.....) yang tersedia apabila ada dan dianggap perlu

III. Identitas Responden :

1. Nama Responden :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki ☐ Perempuan ☐
3. Pendidikan Terakhir : SD ☐
 SMP ☐
 SMA ☐
 D3 ☐
 Sarjana ☐

4. Umur :
 a. 17 – 27 Tahun ☐
 b. 28 – 38 Tahun ☐
 c. 39 – 49 Tahun ☐
 d. 50 Tahun keatas ☐

IV. Pertanyaan

| No | Item pertanyaan | SB | B | CB | KB | TB |
|----|-----------------|----|---|----|----|----|
|----|-----------------|----|---|----|----|----|



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| Kurikulum Terpadu (<i>integrated curriculum</i>) | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu mendapat penjelasan dalam memilih Bupati Tahun 2017 | | | | | |
| 2 | Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu mendapat koordinasi dalam pilkada oleh pengurus pilkada kepada masyarakat | | | | | |
| Hari Terpadu (<i>integrated day</i>) | | | | | | |
| 3 | Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu ikut berpartisipasi dalam memilih Bupati Kampar tahun 2017 | | | | | |
| 4 | Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu memiliki pengetahuan dalam pemilihan Bupati tahun 2017 | | | | | |
| Pembelajaran Terpadu (<i>integrated learning</i>) | | | | | | |
| 5 | Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu memiliki pemahaman tentang hak dalam memilih Bupati Kampar tahun 2017 | | | | | |
| 6 | Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu memiliki kewajiban bermasyarakat dalam memilih Bupati Kampar tahun 2017 | | | | | |

Lampiran 2: Rekapitulasi Hasil Angket

| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JML |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 27 |
| 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 27 |
| 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 26 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 24 |
| 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 27 |
| 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 26 |
| 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 22 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 13 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 20 |
| 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| 15 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 21 |
| 16 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 |
| 17 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 18 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 20 |
| 19 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 21 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 29 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 25 |
| 24 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 24 |
| 25 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 23 |
| 26 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 27 |
| 27 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 24 |
| 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 26 |
| 29 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 26 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 |
| 31 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 21 |
| 32 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 24 |
| 33 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 23 |
| 34 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| 35 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 21 |
| 36 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 24 |
| 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 22 |
| 39 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 40 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 25 |
| 41 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 23 |
| 42 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 |
| 44 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 45 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 18 |
| 46 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 47 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 20 |
| 48 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 24 |
| 50 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 20 |
| jml | 203 | 190 | 201 | 195 | 185 | 205 | 1179 |

Lampiran 3: Daftar Wawancara

1. Panitia Pelaksana Pilkada

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Apakah ada kejelasan dalam memilih yang diajarkan kepada masyarakat?
- b. Apakah Adanya Koordinasi Dalam Pilkada Oleh Pengurus Pilkada Kepada Masyarakat?
- c. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam memilih Bupati di Kabupaten Kampar tahun 2017?
- d. Apakah masyarakat memiliki pengetahuan tentang pilkada Bupati di Kabupaten Kampar tahun 2017?
- e. Apakah Adanya Pemahaman masyarakat Tentang Hak Dalam Memilih Bupati di Kabupaten Kampar tahun 2017?
- f. Apakah masyarakat memahami kewajibannya dalam memilih?
2. Masyarakat
 - a. Apakah ada kejelasan dalam memilih yang diajarkan oleh panitia pelaksana pilkada kepada masyarakat?
 - b. Apakah Adanya Koordinasi Dalam Pilkada Oleh Pengurus Pilkada Kepada Masyarakat?
 - c. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam memilih Bupati di Kabupaten Kampar tahun 2017?
 - d. Apakah masyarakat memiliki pengetahuan tentang pilkada Bupati di Kabupaten Kampar tahun 2017?
 - e. Apakah Adanya Pemahaman masyarakat Tentang Hak Dalam Memilih Bupati di Kabupaten Kampar tahun 2017?
 - f. Apakah masyarakat memahami kewajibannya dalam memilih?

Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

